

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Putra, 2015).

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar Negara Berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya (Putra, 2015).

Menurut (Syahwier, 2016) fenomena kemiskinan masih menjadi problem pokok terutama di daerah-daerah. Pembangunan ekonomi yang tidak merata mengaburkan realita kemiskinan yang membuat indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman yang meningkat di daerahnya masing-masing. Penyerapan pemerintah kabupaten/kota mengenai kemiskinan menunjukkan intergrasi kenegarawan yang kuat. Namun, masala kemiskinan dengan menghitung kenaikan laju pertumbuhan ekonomi atau mengeluarkan dana bantuan sosial atau dana hibah sebesar-besarnya.

Faktor pertama yang mempengaruhi persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Mereka tidak mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah-langkah penghematan anggaran pemerintah. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Persentase

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga bagus digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah (Tambunan, 2007).

Kemiskinan disamping pengangguran dan ketimpangan merupakan masalah klasik yang besar dan mendasar bagi sebagian besar negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Berbagai indikator dan parameter untuk mengukur tingkat kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk miskin yang telah menjadi permasalahan di kehidupan masyarakat, sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan dan kelompok masyarakat relatif yang lebih kaya (Suherman, 2012).

Sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan, selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Serta masalah-masalah lainnya yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan (Bappenas, 2004).

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari indu permasalahan kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampilkan hasil yang optimal, masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, seseorang

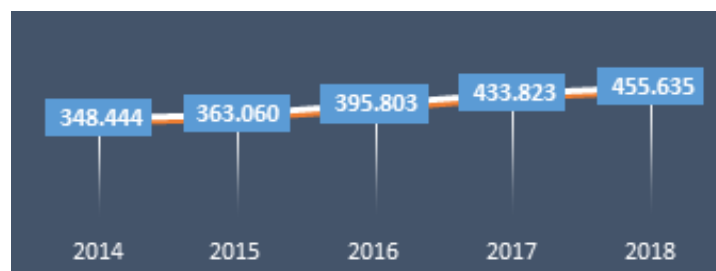
atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset, dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkannya dan tidak memiliki rasa bebas. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Yaqoub, 2012) bahwa upaya menurunkan pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan ada miskin. Sehingga dikatakan dengan pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah. Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan, bahkan masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan (Yaqoub, 2012).

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian suatu wilayah dengan melihat percepatan perekonomiannya. Hal ini menunjukkan bahwa

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kenaikan permintaan akan barang dan jasa, artinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan meningkat, sehingga secara tidak langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan tidak mampunya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan (Azmi, 2019). Berikut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mengenai tingkat kemiskinan Kabupaten Paser yaitu :

Gambar 1.1
Garis Kemiskinan Kabupaten Paser



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (2019)

Paser merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, berdasarkan data grafik diatas yang diperoleh dari BPS Kabupaten Paser mengenai tingkat kemiskinan mengalami peningkatan di setiap periodenya. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan mencapai 455.635 orang, Fenomena di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Paser masih berada dibawah garis kemiskinan, merupakan suatu kenyataan yang membuat kita

prihatin karena seolah-olah kemiskinan itu tetap muncul dan merupakan bagian dari pembangunan, padahal pembangunan ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan bukan berjalan bersama-sama. Menurut penelitian Saputra 2011 dan Azmi 2019 menyatakan bahwa besarnya angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama jumlah penduduk, PDRB, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, pada laju pertumbuhan penduduk 2010-2020 di Kabupaten Paser mencapai 1,75% per tahun. Hingga pada 2020 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Paser sejumlah 277.401 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 143.988 jiwa dan perempuan 133.403 jiwa.. Dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk ini Pemerintah Kabupaten Paser harus mempunyai strategi yang berkesinambungan dengan keadaan tiap tahun juga target jangka menengah agar kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan menjadi lebih terarah.

Pengangguran di Kabupaten Paser menurut Muksin tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2017 yaitu dari 5,54 persen menjadi 6,87 persen. Pengangguran di Kabupaten Paser juga masih diatas pengangguran nasional 5,34 persen dan pengangguran Kaltim 6,60 persen. Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Pengangguran yang tinggi dapat membawa berbagai dampak pada proses pembangunan ekonomi. Agar tidak terus berlanjut, pemerintah harus mengatasi masalah pengangguran, karena masalah pengangguran adalah masalah yang sangat vital dan sensitif bagi

kestabilan ekonomi dan keamanan suatu negara. Pengangguran dapat membawa dampak yang sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Pengangguran berdampak dalam bidang ekonomi, sosial, maupun secara individual pada pelaku pengangguran itu sendiri.

Perekonomian Kabupaten Paser di tahun 2020 mengalami penurunan nominal dibandingkan tahun sebelumnya 2019. PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku mencapai 43,34 triliun rupiah di tahun 2020, menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 48,02 triliun rupiah. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 menurun hingga 4,68 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini disebabkan oleh penurunan baik nilai maupun volume pengeluaran pada beberapa komponen PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku. Secara nominal, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, PMTB, Perubahan Inventori dan Net Ekspor Barang dan Jasa mengalami penurunan dan hanya Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami peningkatan nilai. Hal ini lah yang menyebabkan penurunan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Paser.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2020?

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser Tahun 2010- 2020
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser Tahun 2010-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis, dengan penelitian ini sebagai salah satu tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Ekonomi, selain itu harapan penulis bisa menambah wawasan serta bisa lebih memahami teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi yaitu terutama terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan bisa digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu ekonomi.

- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik serta permasalahan yang sama ataupun ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam masalah kemiskinan, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan terkait penurunan tingkat kemiskinan.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Paser. Kabupaten Paser adalah daerah yang merupakan bagian dari Kalimantan Timur.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian telah dilaksanakan ke dalam beberapa tahapan, seperti dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

[illegible]

